

PENGARUH KEBANGKITAN RRT TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

Nova Rianti¹, Muhammad Yusra², Rifki Dermawan³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹riantinova123@gmail.com, ²monsieur.yusra@gmail.com,
³rifkidermawan@soc.unand.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the rise of the RRC on Indonesia's foreign policy during the era of President Joko Widodo. This research has an urgency about China, which is currently experiencing a resurgence to encourage changes in the foreign policy of various countries in viewing and establishing diplomatic relations with China. In this study, researchers will see how Indonesia's position responds to the trend of the rise of the RRC. This study uses the concept of image theory from Richard K. Herrmann and Michael P. Fischerkeller who identified that in viewing actor behavior in international relations, it would be better to look at it from a verbal description of the dynamics in foreign relations. The data collection technique in this study is qualitative using a descriptive approach. The results of this study indicate that of the five images contained in image theory, the image given by Indonesia to China during the reign of President Joko Widodo is ally. This can be seen from the RRC's motivation, China's capability, and the RRC's decision-making process. Indonesia views China as an ally for its national development, thus encouraging Indonesia to strengthen its relations and cooperation with China.

Keywords: Joko Widodo, Image Theory, Indonesia, China

Pendahuluan

Perkembangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) kini semakin pesat, hal ini semakin membuat banyak pihak meyakini bahwa RRT kini bangkit menjadi salah satu kekuatan global yang penting. Perubahan yang dipilih oleh RRT pada akhir tahun 1970-an, tepatnya melalui pemerintahan Deng Xiao Ping dengan penerapan kebijakan pintu terbuka membawa Tiongkok memasuki modernitas ekonomi pasar, yang menjadikan titik balik bagi RRT. Kemajuan ekonomi Tiongkok yang signifikan ini tercermin dari berbagai hal. Dari segi *Gross Domestic Product* (GDP), GDP RRT yang pada tahun 1960 hanya berkisar USD

59.716 miliar terus meningkat pada tahun 1973 menjadi USD 138.544 miliar dan berlanjut hingga tahun 2018 mencapai USD 13.895 triliun. Besaran *Foreign Direct Investment* (FDI) RRT pun juga mengalami peningkatan dari yang sebesar USD 80.000 miliar pada tahun 1979 menjadi USD 235.365 miliar pada 2018. Terakhir, nilai mata uang Yuan (atau Renminbi) terus mengalami peningkatan dan menjadi acuan alternatif bagi berbagai Bank Sentral negara lain. (Dong Hae, 2015).

Fenomena kebangkitan RRT membuat berbagai pihak di dunia mulai melihat ke RRT dan memiliki tanggapan yang beragam akan hal tersebut. Seperti pada Amerika Serikat (AS), banyak pihak yang khawatir dengan kebangkitan RRT yang dapat mengancam ekonomi dan keamanan mereka yang membuat Presiden Barack Obama mengeluarkan kebijakan luar negeri *Pivot to Asia*. Adapun berbagai negara di Amerika Latin dan Karibia seperti Kuba, Argentina, Chile, Venezuela, dan Brazil menjadikan kebangkitan RRT sebagai alternatif mitra yang dapat menggantikan *Washington Consensus*.

Tren global terhadap RRT turut terlihat di Indonesia. Melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia menjalin kerja sama ekonomi yang lebih intens dengan penandatanganan kemitraan strategis untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Beberapa tahun setelah itu, Indonesia kembali menandatangani kemitraan strategis komprehensif tepatnya pada tahun 2013. Namun, hubungan yang berkembang dengan RRT tidak hanya membawa peluang tetapi juga tantangan bagi Indonesia. Adanya peningkatan persaingan ekonomi dan stigma negatif tentang RRT membuat kerja sama masih belum begitu banyak berarti.

Akan tetapi, tren keterlibatan RRT dalam kerja sama Indonesia dalam pembangunan, terutama melalui *One Belt One Road* (OBOR), ternyata tidak berhenti dan justru mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini terlihat pada tahun 2019, Indonesia menandatangani sebanyak 23 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan RRT yang berkaitan dengan bisnis, proyek industri, dan kerja sama riset. Pada saat yang bersamaan,

Indonesia menyetujui pembukaan koridor kerja sama di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, hingga Bali yang berkaitan dengan OBOR.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tentang realisasi investasi penanaman modal luar negeri secara global, menunjukkan bahwa posisi Tiongkok dalam investasi ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2014-2019. Data tersebut menunjukkan pada tahun 2014 Tiongkok tidak termasuk negara investor ke Indonesia. Namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan menempati urutan ketiga teratas, hingga pada tahun 2019 menduduki posisi kedua dunia melampaui Jepang.

Berdasarkan data BPS total FDI dari Tiongkok ke Indonesia, menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah investasi dari Tiongkok ke Indonesia dari tahun 2014-2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa total FDI Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2014 sebanyak USD 6,79 miliar dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai hingga USD 15,13 miliar (Statista, 2021). Hubungan Indonesia dengan RRT semakin dipererat melalui posisi RRT yang menjadi mitra penyumbang FDI kedua terbesar sebagai mitra dagang terpenting, dan sebagai mitra dalam proyek pembangunan melalui OBOR. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo menarik untuk diteliti. RRT yang saat ini sedang mengalami kebangkitan membuat negara-negara di belahan dunia melirik kepada RRT dan condong melakukan kerja sama dengan RRT. Pada penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana dengan posisi Indonesia menanggapi tren kebangkitan RRT tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan dan mengeksplorasi fenomena-fenomena sosial yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah gambaran kompleks dan diinterpretasikan dalam sebuah laporan detail dan menyeluruh. Batasan penelitian ini ialah pada rentang waktu 2014-2019 yaitu periode pertama

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Unit analisis pada penelitian ini adalah politik luar negeri Indonesia pada era Presiden Joko Widodo, dan unit eksplanasinya adalah kebangkitan RRT. Pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan pemanfaatan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari: akun Twitter @jokowi, @KemensetnegRI, @Menlu_RI, dan @Kemlu_RI. Selanjutnya pengumpulan data juga akan diperoleh dari pidato kenegaraan RI dan pernyataan pers tahunan menlu dari rentang waktu tahun 2014-2019. Selanjutnya ialah pengumpulan data sekunder yang mana diperoleh dengan merujuk kepada berbagai sumber bacaan dan literatur akademik seperti buku, jurnal, artikel, situs resmi, *website* dan sebagainya. Konsep yang digunakan pada penelitian ini ialah *image theory* dari Richard K. Hermann dan Michael P. Fischerkeller.

Tinjauan Pustaka

Image theory menekankan bahwa perubahan perilaku suatu aktor dalam perpolitikan internasional tidak hanya berdasarkan pada keuntungan dan kerugian secara riil. Namun dalam hal ini juga melibatkan persepsi imajiner terhadap aktor maupun isu yang menjadi objek bagi yang bersangkutan. Hermann dan Fischerkeller menyederhanakan persepsi ini dalam lima bentuk gambaran atau *five ideal-typical image*. Konsep ini dikembangkan dari analisis Joseph Grieco mengenai konsep 'k' dalam menjelaskan tentang kepekaan aktor terhadap kesenjangan antara *absolute gain* dan *relative gain*. Dari keenam faktor penentu 'k', mayoritas melibatkan aspek psikologi mengenai persepsi negara tertentu terhadap pihak lainnya. Seperti hubungan teman atau musuh di masa lampau, persepsi mitra akan musuh bersama, dan sebagainya.

Ada lima gambaran yang terdapat dalam *image theory* yaitu *enemy*, *ally*, *degenerate*, *imperialist*, dan *colony*. Dalam menentukan gambaran akan

perubahan perilaku suatu aktor mendasarkan kepada tiga kategori pengelompokan dalam *image theory* yaitu melalui deskripsi target tentang motivasi target, deskripsi subjek tentang kapabilitas target, dan deskripsi subjek tentang proses pengambilan keputusan target. Dari lima gambaran yang terdapat dalam *image theory* yang dikembangkan oleh Hermann dan Fischerkeller, peneliti menggunakan gambaran *ally* dalam menganalisis mengenai pertanyaan penelitian yang diangkat yaitu pengaruh kebangkitan RRT terhadap politik luar negeri Indonesia pada era presiden Joko Widodo. Melalui pencarian datayang telah peneliti lakukan terhadap data-data primer yang akan peneliti analisis, ditemukan hasil bahwasanya data-data tersebut hanya relevan dengan gambaran *ally*.

Hasil dan Pembahasan

Image Perception* Indonesia terhadap RRT dalam Bentuk *Ally

Motivasi Republik Rakyat Tiongkok

Melihat kepada Pidato Kenegaraan RI tahun 2018, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan usaha kecil dan menengah, perluasan lapangan kerja, stabilitas harga, dan peningkatan daya saing investasi dan ekspor. Presiden Jokowi menyoroti hal tersebut dikarenakan ketertinggalan Indonesia atas aspek-aspek tersebut dan menegaskan keseluruhan tersebut sebagai hambatan bagi Indonesia untuk terus bertumbuh. Hal tersebut perlu untuk diatasi agar Indonesia dapat lebih terhubung satu sama lain dan menjadi lebih produktif dalam penggalakan pertumbuhan guna mencapai kesejahteraan.

Untuk mencapai semua itu, pemerintah tidak hanya menjalankan berbagai kebijakan domestiknya, melainkan juga aktif dalam politik internasional. Dalam

pidato kenegaraan tahunan pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya diplomasi dalam mempercepat peninjauan berbagai kerja sama internasional yang menguntungkan. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mempertimbangkan berbagai mitra strategis yang dinilai dapat diajak untuk memperluas kerja sama dan memperdalam hubungan luar negeri di antara mereka, salah satu negara yang dipilih adalah RRT.

Secara garis besar, Indonesia memandang baik serangkaian kerja sama yang dijalinnya dengan RRT. Sebagai contohnya, Menlu RI menegaskan dalam cuitan di Twitter pada 12 Juli 2018 bahwa beliau menyambut baik pembelian 1,21 juta ton produk sawit dan turunannya oleh RRT. Salah satu ancaman besar bagi RRT ialah persoalan perlambatan ekonomi di RRT. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi, RRT memerlukan kerja sama yang lebih dengan mitranya, salah satunya adalah Indonesia. Melalui pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Perdana Menteri (PM) RRT yaitu Li Keqiang menegaskan bahwa baik Indonesia dan RRT merupakan negara tetangga yang baik dan memiliki kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, pembangunan, perdamaian dan stabilitas dunia. Bahkan, pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping di Hangzhou, RRT, keduanya menyatakan bahwa baik Indonesia dan RRT berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai kepentingan, terutama pada manufaktur dan infrastruktur.

Melalui laman web resmi Setneg RI diketahui bahwa Indonesia menghadiri *KTT Belt and Road Forum International* di Beijing. Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam program *Belt and Road Initiative*

setelah pertemuan tersebut. Hal ini menandai ketertarikan Indonesia untuk terlibat dengan program pembangunan yang diprakarsai oleh RRT. Selain bergabungnya Indonesia ke dalam *Belt and Road*, Indonesia pun juga menandatangani kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok 2017-2021 pada tanggal 14 Mei 2017. Hal tersebut disampaikan melalui cuitan Twitter dari akun @Kemlu_RI pada tanggal 22 Januari 2016 yang menyebutkan bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai hal yang penting bagi meningkatkan keyakinan investor untuk berinvestasi ke Indonesia.

Indonesia pada era Presiden Joko Widodo memberikan *image perception* kepada RRT berupa gambaran *ally*. Hal ini peneliti temukan karena Indonesia menjadikan RRT sebagai mitra dalam berbagai kerja sama. Ada kesamaan dan ketersalinghubungan atas motivasi politik luar negeri masing-masing. Politik luar negeri Indonesia beserta prioritas nasional nya berfokus kepada akselerasi pembangunan dan peningkatan ekonomi dari berbagai aspek seperti pada infrastruktur, sumber daya manusia, dan pengaplikasian teknologi. Pada sisi lain, RRT menetapkan prioritas nasional mereka pada mempromosikan pembangunan dan kerja sama yang dapat memberi kontribusi penting bagi pencapaian utama sebagai negara sosialis terkemuka.

Kapabilitas Republik Rakyat Tiongkok

Indonesia memandang RRT sebagai mitra penting karena memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, terutama pada kekuatan finansial dan pemodal

disertai dengan teknologi. Pada finansial dan pemodalan itu sendiri, RRT sejauh ini merupakan kekuatan penting ekonomi melalui nilai GDP sebesar USD 13.895 triliun dan nilai FDI sebesar USD 235.365 miliar pada tahun 2018 RRT pun juga merupakan salah satu dari tiga hingga lima negara dengan nilai FDI sekaligus total perdagangan terbesar di Indonesia melalui realisasi penanaman modal di tahun 2019 mencapai USD 4.744,51 juta dan total neraca perdagangan Indonesia sebesar USD 72.670.066,4 pada tahun 2018.

Selain pada finansial dan pemodalan, Indonesia tertarik bekerja sama dengan RRT mengingat penguasaan teknologi. Hal demikian terlihat dari sambutan Presiden Joko Widodo kepada Jack Ma sebagai raja *e-commerce* Asia melalui platform Alibaba. Begitupun dengan pernyataan Jack Ma kepada Presiden Joko Widodo di Hangzhou, RRT yang menyebutkan bahwa UMKM semestinya diberi akses teknologi agar dapat berkembang lebih jauh. Untuk mendorong aplikasi teknologi, Indonesia menjalin kerja sama dengan Alibaba terkait pengembangan sumber daya manusia, bisnis, hingga pengelolaan *start-up* disertai dengan implementasi platform Alibaba dalam penjualan produk Indonesia melalui Inamall dan lainnya.

Tidak sekedar dari kapabilitas finansial dan pemodalan disertai dengan teknologi, hubungan Indonesia dengan RRT diperkuat dengan adanya upaya baik dari kedua belah pihak untuk meredam konflik. Indonesia berselisih dengan RRT terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, terlebih melalui kebijakan penenggelaman kapal ilegal, dan adanya protes dari Indonesia atas intervensi *costguard* Tiongkok terkait upaya penangkapan KM Kway Fey 10078 yang berlayar ilegal di Natuna.

Sehingga Indonesia menyampaikan nota protes dan dilakukan pemanggilan kuasa usaha sementara RRT untuk Indonesia yaitu SunWaide pada bulan Maret 2016. Indonesia maupun RRT menegaskan bahwa mereka tetap akan bekerja sama untuk mempertahankan kestabilan di kawasan tersebut. PM Li Keqiang menegaskan bahwa RRT tetap akan bekerja sama dengan pihak yang ada guna menjaga perdamaian di LTS. Begitupun dengan cuitan dari akun Twitter @KemensekRI pada April 2016 yang menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok akan meningkatkan hubungan persahabatan. Dari penjelasan tersebut terlihat meskipun ada perselisihan antara Indonesia dan RRT hingga Indonesia melayangkan nota protes, namun sebulan setelah kejadian tersebut di akun pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia dan RRT akan meningkatkan persahabatan.

Dari hasil analisis melalui kapabilitas RRT, peneliti menemukan bahwasanya Indonesia pada era Presiden Joko Widodo memberikan *image perception* kepada RRT berupa gambaran *ally*. Hal ini peneliti temukan karena Indonesia menjadikan RRT sebagai mitra dalam berbagai kerja sama dikarenakan kapabilitas RRT yang besar dalam menopang pembangunan yang diperlukan oleh Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada besarnya ekonomi yang dimiliki oleh RRT yang terlihat dari segi GDP dan FDI RRT. Adanya penguasaan teknologi yang mutakhir, hingga kehadiran program pembangunan yang masif melalui program *Belt and Road*. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan RRT sebagai rekan kerja sama dalam akselerasi pembangunan nasionalnya.

Proses Pengambilan Keputusan Republik Rakyat Tiongkok

Sistem pemerintahan di RRT merupakan parlementer dengan parlemen yang hanya memiliki satu kamar dan satu partai (PKT). Presiden di RRT memiliki kekuatan politik yang besar di PKT ketika ia memegang kekuasaan tertentu di partai, seperti Sekretaris Jenderal PKT. Presiden Xi Jinping memegang kekuasaan yang lebih menyeluruh di partai berkat tiga jabatan yang dia emban sejauh ini, yaitu sebagai Presiden RRT, Sekretaris Jenderal PKT, dan kepala komisi militer pusat. Presiden Xi Jinping juga memegang posisi sebagai kepala komisi pertahanan nasional PKT, kepala pusat komisi reformasi mendalam dan komprehensif, kepala komisi sentral finansial dan urusan ekonomi, dan kepala sentral komisi hubungan luar negeri. Dengan demikian, kerja sama dengan RRT dapat dilakukan dengan melakukan dialog secara langsung dengan Presiden Xi Jinping maupun pemegang kekuasaan RRT penting lainnya, seperti PM Li Keqiang dan PM sebelumnya yaitu Liu Yandong.

Hal demikian tercermin dari intensnya kunjungan Presiden Joko Widodo ke RRT. Tercatat ada sebanyak 3 kali kunjungan dan pertemuan Presiden Joko Widodo ke RRT secara bilateral dalam kurun waktu 2014 hingga 2016. Selain itu, terdapat dua kunjungan Presiden Joko Widodo ke RRT dalam rangka pertemuan multilateral dalam KTT G20 di Hangzhou pada 4-5 September 2016 dan KTT *Belt and Road Forum* di Beijing pada 14-15 Mei 2017. Bahkan, sebelum KTT G20 dimulai, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan menegaskan dukungan penuh atas posisi presidensial RRT di G20. Hal serupa juga terjadi disela pertemuan KTT G20 di Osaka, Jepang pada 28 Juni

2019 di mana Presiden Xi Jinping menyambut baik ASEAN *outlook on Indo-Pacific* disertai dengan dialog atas sejumlah isu.

Berbagai kesepakatan antara Indonesia dengan RRT diperoleh pada pertemuan langsung antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping. Misalnya saja pada 3 September 2016, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping menghasilkan kesepakatan atas peningkatan ekspor buah tropis Indonesia ke RRT, kemudahan regulasi bagi produk Indonesia, peningkatan investasi di berbagai bidang seperti manufaktur dan infrastruktur, mendorong peningkatan wisatawan RRT ke Indonesia, perpanjangan dan pembaharuan *bilateral currency swap agreement 2016-2019*, usulan pembangunan kantor pusat AIIB di Indonesia disertai dengan pendanaan tiga proyek Indonesia oleh AIIB. Selain itu, Beliau juga memperoleh kesepakatan dengan Presiden Xi Jinping pada pertemuan sela KTT APEC 2018 di Port Moresby, Papua Nugini. Kesepakatan tersebut meliputi kemudahan ekspor buah tropis, ekspor sarang burung walet, melanjutkan kerja sama terkait kelapa sawit dan turunannya, dorongan untuk tidak menerapkan kuota dan anti-dumping bagi produk Indonesia, hingga peningkatan wisatawan RRT dan Investasi terkait revolusi industri 4.0.

Dari hasil analisis melalui proses pengambilan keputusan oleh RRT, peneliti menemukan bahwasanya Indonesia di era Presiden Joko Widodo memberikan *image perception* kepada RRT berupa gambaran *ally*. Hal ini peneliti temukan karena proses pengambilan keputusan di RRT yang dinilai tidak begitu rumit bagi Indonesia. Yang mana hal tersebut tercermin dari jabatan

Presiden RRT, Xi Jinping yang juga mencakup berbagai jabatan strategis di pemerintahan RRT maupun di PKT. Hal tersebut membuat keputusan RRT terpusat pada Presiden Xi Jinping dan elit lainnya, sehingga negosiasi dapat dilakukan secara langsung dengan mereka.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan hasil bahwasanya pengaruh dari kebangkitan RRT mendorong Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempererat hubungan diplomatiknya dengan RRT. Dengan menggunakan konsep *image theory* yang digagas oleh Hermann dan Fischerkeller dapat disimpulkan bahwasanya dari lima gambaran yang ada dalam *image theory* maka *image* yang diberikan oleh Indonesia kepada RRT pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah *ally*. Hal ini dikarenakan RRT memiliki motivasi yang besar dalam mendorong penguatan ekonomi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya ialah untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan untuk mendorong perdamaian dan ketertiban global. Indonesia mempererat hubungannya dengan RRT karena adanya motivasi yang berjalan searah dan kapabilitas yang dimiliki RRT dinilai memadai bagi pembangunan nasional Indonesia, dan mudahnya dalam pencapaian kesepakatan tanpa adanya kompleksitas dan hambatan dalam proses pengambilan keputusan di RRT.

Daftar Pustaka

- Aldrich, John, Jie Lu, and Liu Kang. "How Do Americans View the Rising China?" *Journal of Contemporary China* 24, no. 92 (2015): 203–221.
- Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia's Regional Foreign Policy after the 2019 Election." *Asia Policy* 14, no. 4 (2019): 72–78.

- Buzan, Barry. "China in International Society: Is 'Peaceful Rise' Possible?" *The Chinese Journal of International Politics* 3, no. 1 (March 2010): 5–36.
- Fukuoka, Yuki and Kiki Verico, "Indonesia-China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges" (2016): 53–75.
- Herrmann, Richard K., and Michael P. Fischerkeller. *Beyond the Enemy Image and Spiral Model: Cognitive—Strategic Research after the Cold War. International Organization*. Vol. 49, 1995.
- Hsiang, Antonio C. "China Rising in Latin America: More Opportunities than Challenges." *Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets* 1, no. 1 (2010): 1–16.
- Liu, Feng. "China, the United States, and the East Asian Security Order." *Issues and Studies* 49, no. 1 (2013): 99–140.
- Widodo, Joko, Luhut Binsar Panjaitan, Retno Marsudi, Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Enggartiaso Lukita, and Lembong Thomas. "Indonesia Dan Tiongkok Capai Kesepakatan Kerja Sama Di Bidang Ekonomi." *Kantor Staf Kepresidenan*. Jakarta, September 3, 2016.
- Widodo, Joko, Twitter post, December 23, 2016, diakses June 27, 2022, <https://twitter.com/jokowi?t=Bqaod9oId95bs41Fsdn9lg&s=09>
- , Twitter post, September 01, 2018, diakses June 27, 2022, <https://t.co/03yaq8otgf>
- , Twitter post, November 26, 2018, diakses June 27, 2022, <https://t.co/EOEnLWsPTt>
- , Twitter post, November 27, 2018, diakses June 27, 2022, <https://t.co/Hjx9Pm5Dhk>
- , Twitter post, March 21, 2019, diakses June 27, 2022, <https://t.co/8Pt4ODfu07>
- , Twitter post, June 13, 2019, diakses June 27, 2022, <https://t.co/som2MUToMs>